

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN
PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN SERTA GINI RATIO TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
KABUPATEN-KABUPATEN DI PROVINSI JAWA
TIMUR BAGIAN SELATAN**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**KHUSNUL CHOTIMAH
105020113111009**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA GINI RATIO TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN-KABUPATEN DI
PROVINSI JAWA TIMUR BAGIAN SELATAN**

Yang disusun oleh :

Nama : Khusnul Chotimah
NIM : 105020113111009
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Agustus 2017.

Malang, 15 Agustus 2017

Dosen Pembimbing,

**Setyo Tri Wahyudi SE., M.Ec.,
Ph.D**

NIP. 19810702 200501 1 002

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan serta Gini Ratio terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten-Kabupaten di Jawa Timur Bagian Selatan
Khusnul Chotimah

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
Email: Syimalove@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan, serta Gini Ratio terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Timur bagian selatan dalam kurun waktu 2011-2015. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan metode Regresi Data Panel (Pooled Data) yang merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section* yang dianalisis dengan Model *Random Effect (REM)* yang diolah dengan aplikasi *EViews 8.1*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan. Sedangkan untuk variabel Gini Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan.

Kata kunci: Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Gini Ratio, IPM, Random Effect Model (REM)

A. LATAR BELAKANG

Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumberdaya, peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan. Pembangunan merupakan proses struktural dalam meningkatkan perekonomian yang terdapat dalam suatu masyarakat sehingga membawa kemajuan dalam arti peningkatan taraf hidup atau penyempurnaan mutu kehidupan dalam masyarakat yang bersangkutan. Memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul merupakan tanggung jawab yang harus dijawab oleh bangsa Indonesia dalam persaingan keberhasilan pembangunan negara.

Pembangunan manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah pun juga mengemban tanggung jawab yang cukup kompleks peranannya dalam mendorong pembangunan manusia di Indonesia. Berdasarkan sistem desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan di wilayahnya. Salah satunya telah diterapkan di provinsi Jawa timur.

Secara administratif, Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Hal tersebut menjadikan Jawa Timur menduduki posisi sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Namun demikian, peringkat-peringkat yang didudukinya tersebut masih belum didukung dengan pembangunan manusia yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh tingkat

IPM di Jawa Timur yang tergolong masih cukup rendah, terutama di wilayah Jawa Timur bagian selatan yang tergolong dalam daerah tertinggal. Menurut harian Kompas disebutkan bahwa wilayah utara Pulau Jawa sangat terbuka, berkembang, dan maju secara sosial dan ekonomi. Sedangkan wilayah selatannya justru sebaliknya. Di Jawa Timur, daerah-daerah itu setidaknya melintasi 8 Kabupaten yaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi.

Tabel 1.1: Indeks Pembangunan Manusia Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2011-2015

Kab./Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata2
1. Pacitan	61.14	62.03	62.94	63.38	63.81	64.92	63.42
2. Ponorogo	64.13	65.28	66.16	67.03	67.40	68.16	66.81
3. Trenggalek	63.67	64.27	65.01	65.76	66.16	67.25	65.69
4. Tulungagung	67.28	67.76	68.29	69.30	69.49	70.07	68.98
5. Blitar	64.79	65.47	66.17	66.49	66.88	68.13	66.63
6. Kediri	66.24	66.84	67.29	68.01	68.44	68.91	67.90
7. Malang	63.47	63.97	64.71	65.20	65.59	66.63	65.22
8. Lumajang	59.62	60.72	61.31	61.87	62.33	63.02	61.85
9. Jember	59.94	60.64	61.31	62.43	62.64	63.04	62.01
10. Banyuwangi	64.54	65.48	66.12	66.74	67.31	68.08	66.74
11. Bondowoso	59.47	60.46	62.24	63.21	63.43	63.95	62.66
12. Situbondo	60.07	60.82	62.23	63.43	63.91	64.53	62.98
13. Probolinggo	59.83	60.30	61.33	62.61	63.04	63.83	62.22
14. Pasuruan	60.79	61.43	62.31	63.74	64.35	65.04	63.37
15. Sidoarjo	73.75	74.48	75.14	76.39	76.78	77.43	76.04
16. Mojokerto	68.14	68.71	69.17	69.84	70.22	70.85	69.76
17. Jombang	66.20	66.84	67.82	68.63	69.07	69.59	68.39
18. Nganjuk	65.60	66.58	68.07	68.98	69.59	69.90	68.62
19. Madiun	64.87	65.98	67.32	68.07	68.60	69.39	67.87
20. Magetan	67.58	68.52	69.56	69.86	70.29	71.39	69.92
21. Ngawi	64.52	65.84	66.72	67.25	67.78	68.32	67.18
22. Bojonegoro	62.19	63.22	64.20	64.85	65.27	66.17	64.74
23. Tuban	61.33	62.47	63.36	64.14	64.58	65.52	64.01
24. Lamongan	65.40	66.21	67.51	68.90	69.42	69.84	68.37
25. Gresik	69.90	71.11	72.12	72.47	72.84	73.57	72.42
26. Bangkalan	57.23	58.63	59.65	60.19	60.71	61.49	60.13
27. Sampang	54.49	55.17	55.78	56.45	56.98	58.18	56.51
28. Pamekasan	59.37	60.42	61.21	62.27	62.66	63.10	61.93
29. Sumenep	57.27	58.70	60.08	60.84	61.43	62.38	60.69
30. Kota Kediri	72.20	72.93	73.66	74.18	74.62	75.67	74.21
31. Kota Blitar	72.56	73.08	73.53	74.53	75.26	76.00	74.48
32. Kota Malang	76.69	77.36	78.04	78.44	78.96	80.05	78.57
33. Kota Probolinggo	67.30	68.14	68.93	70.05	70.49	71.01	69.72
34. Kota Pasuruan	69.69	70.41	72.01	72.89	73.23	73.78	72.46
35. Kota Mojokerto	72.78	73.47	74.20	74.91	75.04	75.54	74.63
36. Kota Madiun	75.98	76.48	77.21	78.41	78.81	79.48	78.08
37. Kota Surabaya	77.20	77.62	78.05	78.51	78.87	79.47	78.50
38. Kota Batu	68.66	69.76	70.62	71.55	71.89	72.62	71.29
39. Jawa Timur	65.36	66.06	66.74	67.55	68.14	68.95	67.49

Sumber: BPS Jatim, diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja pembangunan manusia di wilayah Jawa Timur pada umumnya cenderung positif di tiap tahunnya terutama pada wilayah Jawa Timur bagian selatan yang rata-rata nilai IPMnya masih dibawah angka rata-rata nilai IPM di Jawa Timur. Padahal, nilai IPM di Jawa Timur itu sendiri masih tergolong cukup rendah. Tingkat pembangunan manusia tersebut masih terlampau jauh jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain yang terletak di wilayah utara provinsi Jawa Timur yang rata-ratanya mencapai diatas angka 70 poin. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, maka diperlukan upaya khusus yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat di wilayah yang bersangkutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Hal ini bisa dimulai dengan memperbaiki pada setiap daerah kabupaten/kota terkait agar pembangunan bisa lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah tersebut.

Pemerintah akan melakukan pengeluaran belanja pembangunan sebagai langkah untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan dari pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hal tersebut dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua dari beberapa faktor yang mampu mempengaruhi pembangunan manusia. Kedua faktor tersebut merupakan layanan jasa yang disediakan pemerintah. Dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan manusia, fasilitas dan pelayanan untuk pendidikan dan kesehatan yang cukup memadai bagi masyarakat dapat diwujudkan melalui pengeluaran pemerintah di sektor publik yang meliputi dua bidang tersebut. Dengan demikian, maka akan mendorong produktifitas penduduk yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan manusia.

Selain pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan, terdapat unsur lainnya yang juga dapat dijadikan pertimbangan guna meningkatkan kinerja pembangunan manusia. Dalam penelitiannya, Pratowo, dkk mendapati bahwa ketimpangan distribusi pendapatan (dalam bentuk Gini ratio) dapat pula berperan serta dalam meningkatkan pembangunan manusia. Masih cukup tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat tentunya akan mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari.

Efek pembangunan pada sektor pendidikan dan kesehatan serta Gini Rasio tidak dapat berdampak langsung terhadap IPM, melainkan membutuhkan beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya. Terdapat *time lag* ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan atau belanja negara untuk kedua sektor tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian yang menggunakan runtut waktu (*time series*). Penelitian dengan menggunakan runtun waktu akan membantu melihat pengaruh pengeluaran pemerintah pada kedua sektor tersebut terhadap pembangunan. Investasi pemerintah dalam pendidikan dan kesehatan akan menyebabkan peningkatan kualitas modal manusia yang nantinya dapat mempengaruhi pembangunan perekonomian.

Beracuan pada kondisi latar belakang diatas, maka dibentuklah perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah untuk sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Jawa Timur bagian Selatan?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah untuk sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Jawa Timur bagian Selatan?
3. Bagaimana pengaruh Gini Ratio (tingkat ketimpangan pendapatan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Jawa Timur bagian Selatan?

Berdasarkan pada rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah untuk sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Jawa Timur bagian Selatan?

2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah untuk sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Jawa Timur bagian Selatan?
3. Untuk mengetahui pengaruh Gini Ratio (tingkat ketimpangan pendapatan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Jawa Timur bagian Selatan?

B. KERANGKA TEORITIS

A. Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah dianggarkan untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran untuk gaji pegawai pemerintah serta pengeluaran untuk mengembangkan infrastruktur yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Menurut Sukirno (2004), pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa digolongkan menjadi dua yaitu pengeluaran pemerintah untuk konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Pengeluaran untuk konsumsi pemerintah meliputi pembelian barang dan jasa yang secara langsung dikonsumsi pemerintah untuk keberlangsungan kegiatan pemerintahan misalnya pembayaran gaji pegawai, pembelian alat-alat kantor, dan pembelian bensin untuk kendaraan operasional pemerintah. Sedangkan pengeluaran investasi pemerintah dianggarkan untuk membangun prasarana publik seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan saluran irigasi, yang manfaatnya bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat dan dianggarkan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran investasi ini diadakan untuk mendapatkan manfaatnya dimasa mendatang bagi pemerintah. Di Indonesia, pengeluaran konsumsi tercermin dalam pengeluaran rutin, sedangkan pengeluaran pembangunan diwujudkan sebagai bentuk pengeluaran investasi.

Pembangunan manusia dalam konsep Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengutip isi *Human Development Report* (HDR) diartikan sebagai “suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk”, yang mana elemennya secara tegas menggaris bawahi sasaran yang ingin dicapai, yaitu hidup yang sehat dan panjang umur, berpendidikan, serta dapat menikmati hidup yang layak. Dari pengertian tersebut mencerminkan bahwa manusia dalam satu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dengan cara diberikan dukungan oleh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut sehingga bagi masyarakat yang belum memiliki pilihan yang luas akan dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang dimilikinya. Paradigm tersebut memunculkan pilihan-pilihan yang lebih luas dalam hal seperti kebebasan politik, ekonomi dan social serta kesempatan untuk menjadi lebih

Konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) meranking kinerja pembangunan manusia dari skala 0 hingga 100 berdasarkan tiga komponen IPM tersebut. Skala 0 menunjukkan tingkat pembangunan manusia terendah, dan skala 100 menunjukkan tingkat pembangunan manusia tertinggi. Kategorinya yaitu:

- a. Tinggi : IPM >80,0
- b. Menengah atas : IPM antara 66,0 - 79,9
- c. Menengah bawah : IPM antara 50,0 - 65,9
- d. Rendah : IPM <50,0

Indikator Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar dan merupakan tujuan akhir pembangunan, yaitu usia hidup (*Longevity*) yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi), pengetahuan (*Knowledge*) yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan standar kehidupan (*standard of living*), yang diukur dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita tiap tahunnya (Usmaliadanti, 2011).

Rumus penghitungan IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}] \quad (1)$$

Di mana:

$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup

$X_{(2)}$: Indeks pendidikan

$X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak

Pemerintah merupakan fasilitator bagi masyarakat untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang lebih luas. Gambaran yang dapat diambil untuk melihat seberapa jauh peran pemerintah untuk menjadi fasilitator dari pembangunan manusia adalah melalui kebijaksanaan pengeluaran pemerintah yang diambil. Salah satu hal yang paling menentukan keberhasilan pembangunan manusia adalah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Besarnya pengeluaran pemerintah merupakan indikasi dari komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia. Disamping itu, pengeluaran rumah tangga juga merupakan salah satu faktor yang menentukan lancarnya pembangunan manusia. Dalam hal ini, faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggota keluarga, untuk biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta untuk kebutuhan lain yang serupa. Hal tersebut semakin membuktikan bahwa tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam meningkatkan SDM masyarakat. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi/memadai bisa menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan teknologi dan berbagai inovasi yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, yang mana semua hal tersebut bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju. Perekonomian yang baik dicapai dengan memaksimalkan pembangunan manusia di masyarakat yang ditunjang dengan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang baik.

B. Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ada dua kategori tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi di mana tingkat pendapatan seorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah (Sukirno, 2013). Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairy, 2004). Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu distribusi ukuran adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi (Todaro, 2006).

Dari dua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi di kalangan penduduknya. Ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah.

Menurut Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris dalam Arsyad (2010) dalam tulisan Yessi, ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang :

- 1). Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
- 2). Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
- 3). Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
- 4). Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (Capital Intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
- 5). Rendahnya mobilitas sosial.
- 6). Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
- 7). Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.
- 8). Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Terdapat beberapa metode/teknik untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, diantaranya yaitu:

1. **Kurva Lorenz:** Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.

2. **Gini Ratio:** Gini Ratio digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi (Todaro, 2006). Rumus untuk menghitung Gini Ratio adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}] \dots\dots\dots (2)$$

dimana

f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke-i

Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke-i

Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan. Yang artinya semakin tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Kriteria ketimpangan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Kriteria Distribusi Pendapatan

Nilai Koefisien	Kriteria Distribusi Pendapatan
< 0.4	Tingkat ketimpangan rendah
0.4 – 0.5	Tingkat ketimpangan sedang
> 0.5	Tingkat ketimpangan tinggi

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Todaro dan Smith (2004) yang mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan di banyak daerah. Pembangunan manusia juga tentunya akan mendapatkan dampak dari kinerja timpang atau tidaknya distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah. Karena ketika pendapatan penduduk rendah maka akan berdampak pula terhadap pembangunan di wilayahnya, diantaranya yaitu:

1. rendahnya daya beli masyarakat yang dapat menyebabkan pembangunan bidang ekonomi kurang berkembang dengan baik.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah dan menyebabkan hasil pembangunan hanya banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat kelas sosial menengah ke atas.

Dalam penelitiannya, Pratowo, dkk menyebutkan bahwa gini rasio memiliki pengaruh yang negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut berarti bahwa jika nilai gini rasio pada suatu wilayah semakin kecil, maka tingkat IPM akan otomatis menjadi meningkat. Sehingga tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah akan menghasilkan peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia.

C. Kerangka Pemikiran Teoritis

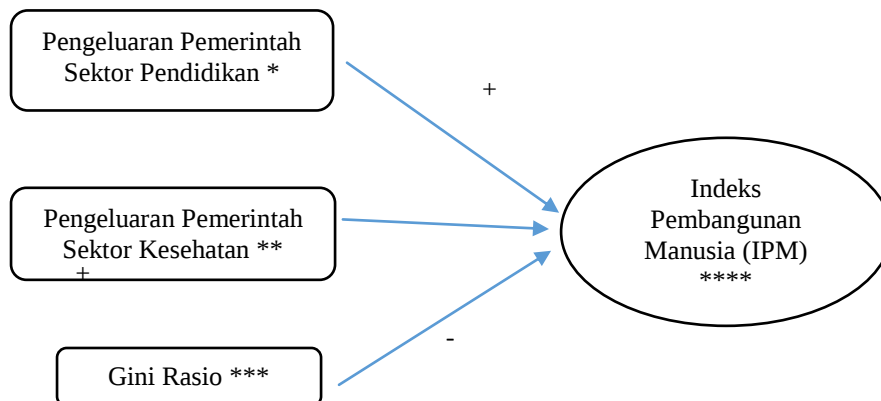
Salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan suatu daerah adalah rendahnya pembangunan manusia yang tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Padahal pembangunan manusia merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Secara konsep, pembangunan manusia merupakan upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli serta dalam peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan. Dilain pihak kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak

serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah (Usmaliadanti, 2011).

Pada dasarnya, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan pembangunan daerah. Anggaran tersebut cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk pembangunan. Kinerja positif dari alokasi pengeluaran pendidikan dan kesehatan ini seharusnya dapat meningkatkan laju pembangunan manusia di wilayah tersebut. Hal ini juga disampaikan pada penelitian yang dilakukan oleh Mauriza, dkk (2013) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks pembangunan Manusia di kawasan barat dan kawasan timur provinsi Aceh, meskipun pengaruh tersebut masih tergolong kecil. Hal tersebut dikarenakan masih belum optimalnya alokasi pengeluaran pemerintah untuk kedua sektor tersebut.

Demikian pula dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat (dalam hal ini menggunakan Gini Ratio) yang juga dapat memberikan peran yang cukup signifikan bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Kinerja Gini Rasio yang cenderung fluktuatif di tiap tahunnya. Di wilayah selatan provinsi Jawa Timur, tingkat Gini Rasio tergolong dalam kriteria ketimpangan rendah. Seharusnya hal tersebut memberikan dampak positif bagi Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana yang disampaikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratowo yang menyebutkan bahwa penurunan pada Gini Ratio akan mengakibatkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa Gini Rasio memiliki pengaruh negative terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Berdasarkan studi kepustakaan yang telah dilakukan serta dari penelitian terdahulu yang telah dijadikan acuan, maka dapat digambarkan skema penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber:

- | | | |
|------|---|---|
| * | : | Christina Usmaliadanti
Sazli Mauriza, Abu Bakar Hamzah, Mohd. Nur Syechalad
Sanusi Fattah dan Aspa Muji |
| ** | : | Achmad Nurur Rofiqi, Sutikno, Andri Wijanarko
Christina Usmaliadanti
Sazli Mauriza, Abu Bakar Hamzah, Mohd. Nur Syechalad
Sanusi Fattah dan Aspa Muji |
| *** | : | Nur Isa Pratowo |
| **** | : | Nur Isa Pratowo
Christina Usmaliadanti
Sazli Mauriza, Abu Bakar Hamzah, Mohd. Nur Syechalad
Sanusi Fattah dan Aspa Muji
Achmad Nurur Rofiqi, Sutikno, Andri Wijanarko |

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian tentang Keterkaitan Jangka Panjang dan Jangka Pendek antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini adalah dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada 8 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur bagian selatan, yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan tempat ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa wilayah-wilayah tersebut termasuk dalam wilayah tertinggal dalam hal pertumbuhan pembangunan manusianya jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Timur. Beberapa diantaranya telah dianggarkan alokasi yang cukup besar untuk sektor terkait, namun tingkat IPMnya masih cenderung rendah. Waktu penelitian ini dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Penetapan batas waktu penelitian tersebut berdasarkan pada adanya perubahan data dan metode penghitungan IPM sejak tahun 2010. Pada tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya, skor IPM didasarkan pada perbandingan harapan hidup, angka melek huruf, pendidikan dan standar hidup, sedangkan mulai tahun 2010 diberi tambahan parameter, yaitu kesetaraan gender dan kemiskinan. Sehingga IPM sebelum tahun 2010 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan data penunjang yang terdiri atas pengeluaran tiap kabupaten di wilayah Jawa Timur bagian Selatan yang meliputi beberapa sektor yaitu sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga digunakan data Gini Ratio dan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masing-masing Kabupaten tersebut. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK).

A. Metode Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, akan digunakan metode Regresi Data Panel. Pemilihan metode tersebut dikarenakan data yang digunakan merupakan data panel, yakni gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*Cross Section*). Data runtut waktu merupakan data yang terdiri atas beberapa periode, sedangkan data silang terdiri atas beberapa objek dengan beberapa jenis data dalam suatu periode waktu tertentu. Keuntungan dari penggunaan data panel yaitu data panel merupakan penggabungan data runtut waktu dan data silang sehingga mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Analisis data peneliti menggunakan aplikasi EViews 8.1.

1. *Estimasi Model Regresi dengan Data Panel* : Penelitian tentang Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten-Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan, menggunakan data *time series* selama 5 tahun yang diwakili data tahunan dari 2011-2015 dan data *cross-section* sebanyak 8 data yang diwakili kabupaten-kabupaten di wilayah selatan provinsi Jawa Timur. Kombinasi dari kedua jenis data tersebut menghasilkan 40 observasi dengan fungsi persamaan data panelnya sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PPD_{it} + \beta_2 PKS_{it} + \beta_3 GR_{it} + u_{it} \quad (2)$$

dimana:

- IPM* = Indeks Pembangunan Manusia kabupaten-kabupaten di wilayah provinsi Jawa Timur bagian selatan
- PPD* = pengeluaran pemerintah sektor pendidikan kabupaten-kabupaten di wilayah provinsi Jawa Timur bagian selatan
- PKS* = pengeluaran pemerintah sektor kesehatan kabupaten-kabupaten di wilayah provinsi Jawa Timur bagian selatan
- GR* = Gini Ratio kabupaten-kabupaten di wilayah provinsi Jawa Timur bagian selatan
- β_0 = intersep
- β_1, β_2 = koefisien regresi variabel bebas
- u_{it} = komponen *error* di waktu *t* untuk unit *cross-section i*
- i* = 1,2,3,.....,8 (data *cross-section* kabupaten-kabupaten di wilayah provinsi Jawa Timur bagian selatan)
- t* = 1,2,3,4,5 (data *time series*, tahun 2011-2015)

2. *Pemilihan Model Regresi Data Panel*: Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman untuk menentukan pilihan dalam mengestimasi data panel.

- a. Uji Statistik F (Uji Chow): Untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam mengestimasi data panel, dapat dilakukan dengan menambahkan variabel dummy sehingga dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda, dapat dilakukan dengan Uji Statistik F. Uji ini digunakan untuk mengetahui metode mana yang paling baik antara metode *Fixed Effect* atau metode *Common Effect* yang merupakan model data panel tanpa variabel dummy. H_0 pada uji ini yaitu bahwa intersep sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk mengestimasi data panel adalah *Common Effect*. Sedangkan Hipotesis alternatifnya (H_1) adalah intersep tidak sama atau model yang tepat untuk mengestimasi data panel adalah *Fixed Effect*.
- b. Uji Hausman: Uji Hausman dilakukan sebagai lanjutan ketika hasil dari Uji Chow menunjukkan bahwa metode yang tepat untuk analisis data panel adalah metode *Fixed Effect*. Uji Hausman diterapkan untuk lebih memastikan bahwa metode *Fixed Effect* merupakan metode yang benar-benar tepat untuk digunakan dalam menganalisis data panel dengan memilih antara model *Random Effect* dengan *Fixed Effect* sebagai bahan yang diuji. Hipotesis yang digunakan dalam Uji Hausman yaitu:

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Dan ketentuan pengambilan keputusannya adalah berdasarkan H_0 ditolak apabila nilai dari *Prob.* lebih kecil daripada nilai α (0,05). Hal tersebut berarti bahwa model yang tepat untuk digunakan dalam analisis data panel yaitu model *Fixed Effect*. Sebaliknya, jika nilai *Prob.* pada output uji hausman menunjukkan angka lebih besar dari nilai α maka bisa dipastikan bahwa H_1 yang ditolak dan artinya kita bisa memilih model *Random Effect* untuk digunakan dalam menganalisis data panel.

3. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas: dilakukan untuk melihat apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji ini dideteksi dengan uji Jaque-Bera jika JB hitung < nilai *chi-square* tabel, maka nilai residual terdistribusi normal.
- b. Uji Multikolinearitas: ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik semestinya tidak terjadi multikolinearitas.
- c. Uji Heteroskedastisitas (*Uji Glejser*): ditujukan untuk menguji apakah model regresi memiliki ragam residual yang sama atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki ragam residual sama (homogen). Hipotesisnya adalah sbb:

H_0 = tidak ada masalah heteroskedastisitas

H_1 = ada masalah heteroskedastisitas

Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam sebuah model regresi, maka perlu dilakukan *Uji Glejser* dengan melihat nilai *Prob.* pada masing-masing variabel independen dengan ketentuan sebagai berikut (Nur, 2015):

Jika *Prob.* > α 0.05 maka H_0 diterima dan tolak H_1

Jika *Prob.* $\leq$ α 0.05 maka H_0 ditolak dan terima H_1

4. Uji Signifikansi Model Regresi Data Panel

- a. Koefisien Determinasi (*R-Square*): Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.
- b. Uji F-Statistik: dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi variabel dependen dengan signifikan. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung pada hasil regresi dengan F tabel.

- c. Uji t-Statistik: dilakukan untuk menguji signifikansi secara parsial dari masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan memperhatikan pada nilai probabilitas dari hasil regresi. Jika $< \alpha 0.05$ maka berarti signifikan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan serta Gini ratio terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Jawa Timur bagian selatan, maka terlebih dahulu dilakukan pemilihan model terbaik untuk analisis regresi. Pengujian yang dilakukan meliputi *Uji Chow (Redundant)* untuk memilih antara model CEM dan FEM, dan Uji Hausman untuk memilih antara FEM dengan REM. Berikut adalah hasil pemilihan model yang telah diujikan dengan EViews 8.1 yang meliputi:

1. *Uji Chow (Redundant Fixed Effect Test)*: uji ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas pada hasil output (*test summary*). Jika nilainya $<$ dari $\alpha 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berdasarkan hasil output yang diperoleh yaitu probabilitas sebesar 0.0000 berarti bahwa model yang terbaik untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*.
2. *Uji Hausman (Hausman Test)*: berdasarkan hasil output yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0.0781 (> 0.05) berarti bahwa model yang terbaik untuk digunakan adalah *Random Effect Model*.

Dari hasil kedua test diatas maka penulis menggunakan model *Random Effect* untuk menganalisis regresi dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dan berikut ini adalah hasil output hasil estimasi dengan menggunakan Model *Random Effect*.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Regresi Data Panel dengan *Random Effect Model*

Variabel Independen	Koefisien	T-Hitung	Prob.	Keterangan
Konstanta	61.57	41.255	0.0000	Signifikan
Peng. Pendidikan (PPD)	2.18	2.183	0.0356	Signifikan
Peng. Kesehatan (PKS)	7.52	3.159	0.0032	Signifikan
Gini Ratio (GR)	1.35	0.346	0.7314	Tidak Signifikan
R-squared = 0.667				
F hitung = 24.023				
F tabel = 2.86				
Prob. F = 0.0000				

Sumber : Hasil Output Eviews diolah

Model regresi berdasarkan ringkasan hasil analisis diatas adalah:

$$IPM = 61.57 + 2.18PPD_{it} + 7.52PKS_{it} + 1.35GR_{it} + e_{it} \quad (4)$$

Dari hasil persamaan regresi diatas, dapat diketahui bahwa:

- a. *Hasil Pengujian Secara Parsial* yaitu sebagai berikut :
 1. Nilai c (konstanta) sebesar 61.57 dengan probabilitas 0.0000 menjelaskan bahwa ketika semua variabel independen bernilai nol, maka nilai IPM adalah sebesar 61.57.
 2. Koefisien regresi pada variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan (PPD) adalah sebesar 2.18 dengan nilai probabilitas 0.0356 (lebih kecil dari $\alpha 0.05$) yang berarti bahwa variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan secara nyata berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Koefisien regresi yang bernilai 2.18 menjelaskan bahwa dalam keadaan *ceteris paribus* apabila variabel

pengeluaran pendidikan meningkat sebesar 1 milyar maka dapat secara pasti juga meningkatkan IPM sebesar 2.18 poin.

3. Koefisien regresi pada variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan (PKS) adalah sebesar 7.52 dengan nilai probabilitas 0.0356 (lebih kecil dari α 0.05) yang berarti bahwa variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan secara nyata berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Koefisien regresi yang bernilai 7.52 menjelaskan bahwa dalam keadaan *ceteris paribus* apabila variabel pengeluaran pendidikan meningkat sebesar 1 milyar maka dapat secara pasti meningkatkan IPM sebesar 7.52 poin.

3. Koefisien regresi pada variabel Gini Ratio (GR) adalah sebesar 1.35 dengan nilai probabilitas 0.7314 (lebih besar dari α 0.05) yang berarti bahwa variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Koefisien regresi yang bernilai 1.35 menjelaskan bahwa dalam keadaan *ceteris paribus* apabila variabel pengeluaran pendidikan meningkat sebesar 1 milyar maka dapat secara pasti meningkatkan IPM sebesar 1.35 poin. Namun pengaruh tersebut tidak signifikan (nyata) karena hasil nilai probabilitas yang lebih besar dari α 5%, yaitu sebesar 0.7314.

b. **Hasil Pengujian Secara Simultan:** dapat dilihat dari hasil F hitung pada output model Random Effect yaitu sebesar 24.023 (dengan probabilitas = 0.0000). Jadi, F hitung lebih besar daripada F tabel ($24.023 > 2.86$) dengan probabilitas lebih kecil dari α 5% ($0.0000 < 0.05$). Dengan demikian maka H_0 ditolak dan kita bisa menerima H_1 yang berarti bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan, serta Gini Ratio berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel IPM. Dengan kata lain, model regresi sudah dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependennya.

c. **Koefisien determinasi (R^2):** pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui nilai *R Square* sebesar 0.667 atau 66.7%. Artinya variabel IPM dijelaskan sebesar 66.7% oleh variabel pengeluaran pendidikan (PPD), pengeluaran kesehatan (PKS), dan Gini Ratio (GR). Sedangkan sisanya sebesar 33.3% dijelaskan oleh variabel lain atau variabel independen di luar persamaan regresi ini.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Jawa Timur bagian selatan. Hasil tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan pada Bab II yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan secara mutlak dibutuhkan untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Jawa Timur, khususnya bagian selatan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan. Diantaranya yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Usaliadanti (2011) yang mendapatkan hasil bahwa pengeluaran untuk sektor pendidikan secara nyata berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil serupa juga didapati oleh Pratowo yang meneliti wilayah barat dan timur provinsi Aceh.

Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dialokasikan berupa penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung untuk penyelenggaraan pendidikan secara merata kepada seluruh masyarakat. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN merupakan kebijakan pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas pendidikan demi terwujudnya cita-cita peningkatan pembangunan manusia di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menempatkan pendidikan sebagai factor penting dalam menunjang pembangunan manusia. Pengalokasian dana pendidikan yang tepat akan dapat mempengaruhi pembangunan manusia.

Dari hasil analisis pada penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan di Kabupaten-Kabupaten di kawasan selatan propinsi Jawa Timur memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2011-2015. Koefisien Regresi pada variabel pengeluaran pendidikan (PPD) sebesar 2.18 dengan nilai signifikansi atau probabilitas 0.0356 (lebih kecil dari α 0.05) yang berarti bahwa variabel

pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan berpengaruh signifikan (nyata) terhadap IPM. Koefisien regresi yang bernilai 2.18 menjelaskan bahwa apabila variabel pengeluaran pendidikan (PD) meningkat sebesar 1 milyar maka dapat secara pasti meningkatkan variabel IPM sebesar 2.18 poin. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada dasarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan mampu mendorong laju peningkatan pembangunan manusia di wilayah kabupaten-kabupaten di provinsi Jawa Timur bagian selatan.

Dengan demikian, pengelolaan dan pengalokasian anggaran pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan secara tepat akan dapat memberikan dampak yang positif bagi peningkatan pembangunan manusia. Karena pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan tersebut merupakan salah satu variabel yang mampu memberikan pengaruh positif bagi pembangunan manusia meskipun perannya tidak terlalu besar di wilayah yang diteliti.

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan (PKS) secara signifikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Timur bagian selatan. Hasil ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fattah (2012) dan penelitian Pratowo yang mendapati bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Di Indonesia, Pengeluaran Pemerintah untuk sektor kesehatan diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara untuk anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. Dengan pengalokasian yang tepat, maka anggaran kesehatan tersebut dapat memberikan hasil yang positif bagi kualitas pembangunan manusia. Karena dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, maka secara otomatis dapat meningkatkan pula nilai IPM di wilayah yang bersangkutan.

Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa koefisien regresi pada variabel pengeluaran kesehatan (PKS) sebesar 7.52 dengan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0.0032 yang artinya variabel pengeluaran kesehatan (PKS) mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel IPM. Koefisien regresi yang bernilai 7.52 menjelaskan bahwa apabila variabel pengeluaran kesehatan meningkat sebesar 1 milyar maka dapat secara otomatis meningkatkan pula variabel IPM sebesar 7.52 poin. Nilai yang tergolong tinggi pada variabel pengeluaran kesehatan mengindikasikan bahwa variabel ini memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia di kabupaten-kabupaten di provinsi Jawa Timur bagian selatan.

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel Gini Ratio (GR) secara tidak signifikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Timur bagian selatan. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pratowo yang mendapati bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Timur bagian selatan tergolong dalam kriteria ketimpangan rendah (<0.4). Namun hal tersebut tidaklah mempengaruhi peningkatan IPM secara nyata. Pengaruh yang diberikan bisa saja jika diiringi oleh variabel lain yang dapat mendukung peran Gini ratio dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia di wilayah yang diteliti. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien variabel Gini Ratio dalam output hasil analisis yaitu sebesar 1.35 dengan tingkat signifikansi/probabilitasnya 0.7314 (lebih besar dari α 0.05). Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial variabel Gini ratio belum bisa mempengaruhi variabel IPM secara nyata di wilayah kabupaten-kabupaten di provinsi Jawa Timur bagian selatan.

Berdasarkan hasil uji secara simultan dan hasil dari koefisien Determinasi (R^2) dihasilkan bahwa hasil F hitung pada output model Random Effect yaitu sebesar 24.023 (dengan probabilitas = 0.0000). Jadi, F hitung lebih besar daripada F tabel ($24.023 > 2.86$) dengan probabilitas lebih kecil dari α 5% ($0.0000 < 0.05$). Dengan demikian maka H_0 ditolak dan kita bisa menerima H_1 yang berarti bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan, serta Gini Ratio berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel IPM. Dengan kata lain, model regresi sudah dapat digunakan untuk

memprediksi pengaruh variabel-variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan, serta Gini Ratio terhadap variabel IPM.

Dengan nilai *R Square* pada output hasil regresi yakni sebesar 0.667 atau 66.7%. Artinya variabel IPM dijelaskan sebesar 66.7% oleh variabel pengeluaran pendidikan (PPD), pengeluaran kesehatan (PKS), dan Gini Ratio (GR). Sedangkan sisanya sebesar 33.3% dijelaskan oleh variabel lain atau variabel independen di luar persamaan regresi ini. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mendukung kinerja pembangunan manusia sebesar 66,7% di wilayah kabupaten-kabupaten di provinsi Jawa Timur bagian selatan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengacu pada data output hasil analisis secara parsial dan penelitian-penelitian terdahulu pada penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diangkat sebagai tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengeluaran Pemerintah untuk sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur bagian selatan pada tahun 2011-2015. Hasil analisis data menunjukkan angka koefisien pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan adalah sebesar 2.18 point dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0356 yang menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 milyar akan meningkatkan IPM sebesar 2.18 point dalam keadaan *ceteris paribus*.
2. Pengeluaran Pemerintah untuk sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur bagian selatan pada tahun 2011-2015. Hasil analisis data menunjukkan angka koefisien pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan adalah sebesar 7.52 point dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0032 yang menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 milyar akan meningkatkan IPM sebesar 7.52 point dalam keadaan *ceteris paribus*.
3. Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang diukur dalam Gini Ratio berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur bagian selatan pada tahun 2011-2015. Hasil analisis data menunjukkan angka koefisien pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan adalah sebesar 1.35 point dengan tingkat signifikansi 0.7314. Hasil tersebut berarti bahwa variabel Gini Ratio secara parsial masih belum bisa berpengaruh secara nyata terhadap Indeks pembangunan Manusia di wilayah yang diteliti.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diuraikan dan dari hasil studi pustaka yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran bagi beberapa pihak diantaranya yaitu:

1. Dalam upaya peningkatan pembangunan manusia di wilayah kabupaten-kabupaten di provinsi Jawa Timur bagian selatan, pemerintah provinsi dan kabupaten yang bersangkutan hendaknya memperhatikan alokasi dana yang akan dikeluarkan. Alokasi dana tersebut hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap unsur-unsur yang merupakan konsep pembangunan manusia, yaitu pada sektor pendidikan dan kesehatan.
2. Pemerintah hendaknya selalu mengupayakan program sosialisasi tentang arti penting kualitas pendidikan dan kesehatan guna memaksimalkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, maka pembangunan manusia di wilayah tersebut akan semakin membaik.
3. Penduduk di wilayah Jawa Timur, khususnya di wilayah Jawa Timur bagian selatan hendaknya membiasakan pola hidup sehat agar tingkat kesehatan lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu juga dengan melaksanakan program pemerintah untuk menempuh pendidikan minimal hingga tingkat SMA atau sederajat. Karena dengan pendidikan minimal SMA maka masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga daya beli akan meningkat dan

secara otomatis dapat meningkatkan kualitas SDM penduduk di Jawa Timur, khususnya di wilayah bagian selatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemaksimalan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, sedangkan peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai penyedia sarana dan prasarana pendukung. Karena harus ada kinerja yang seimbang antara peran pemerintah dengan masyarakat itu sendiri. Karena upaya pemerintah akan kurang efektif jika tidak diiringi dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga laporan hasil penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan syukur terutama penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. Selanjutnya ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada Bapak Setyo Tri Wahyudi SE., M.Ec., Ph.D karena atas bimbingannya penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik, serta kepada staff Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya sehingga jurnal hasil penelitian ini bisa diterbitkan.

Tidak lupa ucapan terima kasih kepada orang tua dan keluarga kecil serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan secara moril maupun materiil sehingga hasil penelitian ini dapat penulis selesaikan sebagaimana mestinya tanpa putus asa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Widodo, dkk. 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. Vol 1, No.1
- Astri, Meylina. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Vol.1. No.1
- BAPPEDA Jatim. 2015. Buku Data Dinamis Provinsi Jawa Timur Semester I 2015. http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2015/09/dinamis_sem_1_2015.pdf (diakses pada Agustus 2017)
- BPS Jatim. 2016. Data Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 1999, 2002, 2004-2015. <https://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/235> (diakses pada Juli 2017)
- BPS Jatim. 2016. Data Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota tahun 2008-2014. <https://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/354> (diakses pada Juli 2017)
- BPS Jatim. 2016. Metodologi Indeks Komponen IPM. [https://jatim.bps.go.id/Subjek/view/id/26#subjekViewTab2\[accordion-daftar-subjek1](https://jatim.bps.go.id/Subjek/view/id/26#subjekViewTab2[accordion-daftar-subjek1) (diakses pada Juli 2017)
- DJPk Depkeu. 2011-2015. Data Anggaran APBD (Fungsi). http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316 (diakses pada Juli 2016)
- Fattah, Sanusi., dkk. 2012. *Local Government Expenditure Allocation toward Human Development Index at Jeneponto Regency, South Sulawesi, Indonesia*

- Harian Kompas. 2009. Ketimpangan Bagian Selatan Jawa. <http://regional.kompas.com/read/2009/04/25/08582952/ketimpangan.bagian.selatan.jawa.1> (diakses pada: Juli 2017)
- Mauriza, Sazli., Abu Bakar Hamzah, dan Mohd. Nur Syechalad. 2013. *Analisis indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Barat dan Kawasan timur Propinsi Aceh*. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
- Miliyan, Yessi. - . Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan. <https://yessimiliyan05.wordpress.com/ekonomi-pembangunan/ketimpangan-distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan/> (diakses pada Juli 2016)
- Nur, Muhammad. 2015. Eviews – Uji Heteroskedastisitas. <https://www.youtube.com/watch?v=fB94ff2vP9s> (diakses pada Agustus 2017)
- Prasetyo, Ahmad Danu dan Ubaidillah Zuhdi. 2013. *The Government Expenditure efficiency toward the Human Development*
- Pratowo, Nur Isa. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Fakultas Ekonomi. Universitas sebelas Maret
- Pemkab. Banyuwangi. 2011. Data APBD menurut Fungsi. https://banyuwangikab.go.id/media/anggaran/pdf/Lampiran_II_APBDDP_2011.pdf (diakses pada Juli 2017)
- Pemkab. Banyuwangi. 2011. Data APBD menurut Fungsi. https://banyuwangikab.go.id/media/anggaran/pdf/Lampiran_II.12015.pdf (diakses pada Juli 2017)
- Razmi, Mohammad Javad, dkk. 2012. *Investigating the Effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran*
- Sihombing, Robin. 2013. Gini Ratio (Teori). <http://lesprivate-statistik.com/index.php/berita/295-gini-ratio-teori> (diakses pada Juli 2017)
- Sukirno, Sadono. 2004. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Usmaliadanti, Christina. 2011. *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009*